



BADAN PUSAT STATISTIK

Jalan dr. Sutomo No. 6-8 Jakarta 10710, Telp. (021) 3841195, 3842508, 3810291-4,
Fax. (021) 3857046, Homepage: <http://www.bps.go.id> E-mail: bpsdq@bps.go.id

Nomor : B-118/02000/KP.111/2024

Jakarta, 22 Februari 2024

Sifat : Segera

Lampiran : 1 (satu) set

Hal : Seleksi Terbuka JPT Utama Calon
Kepala Badan Pusat Statistik

Yth.:

1. Para Sekretaris Jenderal/Sekretaris Kementerian/Sekretaris Utama Lembaga
2. Para Gubernur
3. Para Rektor

di -

Tempat

Dalam rangka pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Utama Kepala Badan Pusat Statistik, kami mengundang Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pusat dan Daerah yang memenuhi syarat untuk mengikuti seleksi terbuka pengisian JPT Utama Kepala Badan Pusat Statistik.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon bantuannya untuk menginformasikan kepada PNS di instansi Bapak/Ibu mengenai seleksi terbuka tersebut sebagaimana pengumuman terlampir. Informasi persyaratan dan tahapan seleksi dapat diakses melalui website <http://seleksiapt.bps.go.id>.

Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Badan Pusat Statistik,



Sekretaris Utama

Atqo Mardiyanto

Tembusan:

1. Menteri PPN/Kepala Bappenas;
2. Menteri PANRB;
3. Plt. Kepala Badan Pusat Statistik;
4. Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara.



Lampiran Surat

Nomor : B-118/02000/KP.111/2024

Tanggal : 22 Februari 2024

DAFTAR KEMENTERIAN

1. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan
2. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
3. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
4. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
5. Kementerian Sekretariat Negara
6. Kementerian Dalam Negeri
7. Kementerian Luar Negeri
8. Kementerian Pertahanan
9. Kementerian Agama
10. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
11. Kementerian Keuangan
12. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
13. Kementerian Kesehatan
14. Kementerian Sosial
15. Kementerian Ketenagakerjaan
16. Kementerian Perindustrian
17. Kementerian Perdagangan
18. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
19. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
20. Kementerian Perhubungan
21. Kementerian Komunikasi dan Informatika
22. Kementerian Pertanian
23. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
24. Kementerian Kelautan dan Perikanan
25. Kementerian Desa, Pembangunan Tertinggal, dan Transmigrasi
26. Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional
27. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
28. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
29. Kementerian Badan Usaha Milik Negara
30. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
31. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif / Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
32. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
33. Kementerian Pemuda dan Olahraga



DAFTAR LEMBAGA NON KEMENTERIAN

1. Arsip Nasional RI
2. Badan Inteljen Negara
3. Badan Nasional Pengelola Perbatasan
4. Badan Pengawas Pemilu
5. Badan Kepegawaian Negara
6. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
7. Badan Informasi Geospasial
8. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika
9. Badan Narkotika Nasional
10. Badan Nasional Penanggulangan Bencana
11. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
12. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
13. Badan Pemeriksa Keuangan
14. Badan Pengawasan Obat dan Makanan
15. Badan Riset dan Inovasi Nasional
16. Badan Pengawas Tenaga Nuklir
17. Badan SAR Nasional
18. Badan Standarisasi Nasional
19. Badan Siber dan Sandi Negara
20. Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia
21. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila
22. Lembaga Administrasi Negara
23. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
24. Lembaga Ketahanan Nasional
25. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia
26. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
27. Badan Keamanan Laut Republik Indonesia
28. Badan Koordinasi Penanaman Modal
29. Dewan Energi Nasional
30. Dewan Ketahanan Nasional
31. Dewan Pertimbangan Presiden
32. Dewan Perwakilan Daerah
33. Dewan Perwakilan Rakyat
34. Kejaksaan Agung RI
35. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
36. Komisi Pemberantasan Korupsi
37. Komisi Pemilihan Umum
38. Komisi Yudisial
39. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
40. Mahkamah Agung
41. Mahkamah Konstitusi
42. Majelis Permusyawaratan Rakyat
43. Ombudsman Republik Indonesia
44. Radio Republik Indonesia
45. Sekretariat Kabinet
46. Televisi Republik Indonesia



DAFTAR PEMERINTAH PROVINSI

1. Provinsi Aceh
2. Provinsi Sumatera Utara
3. Provinsi Sumatera Barat
4. Provinsi Riau
5. Provinsi Jambi
6. Provinsi Sumatera Selatan
7. Provinsi Bengkulu
8. Provinsi Lampung
9. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
10. Provinsi Kepulauan Riau
11. Provinsi DKI Jakarta
12. Provinsi Jawa Barat
13. Provinsi Jawa Tengah
14. Provinsi D.I. Yogyakarta
15. Provinsi Jawa Timur
16. Provinsi Banten
17. Provinsi Bali
18. Provinsi Nusa Tenggara Barat
19. Provinsi Nusa Tenggara Timur
20. Provinsi Kalimantan Barat
21. Provinsi Kalimantan Tengah
22. Provinsi Kalimantan Selatan
23. Provinsi Kalimantan Timur
24. Provinsi Kalimantan Utara
25. Provinsi Sulawesi Utara
26. Provinsi Sulawesi Tengah
27. Provinsi Sulawesi Selatan
28. Provinsi Sulawesi Tenggara
29. Provinsi Gorontalo
30. Provinsi Sulawesi Barat
31. Provinsi Maluku
32. Provinsi Maluku Utara
33. Provinsi Papua Barat
34. Provinsi Papua
35. Provinsi Papua Tengah
36. Provinsi Papua Pegunungan
37. Provinsi Papua Selatan
38. Provinsi Papua Barat Daya



DAFTAR PERGURUAN TINGGI NEGERI

1. Institut Pertanian Bogor
2. Institut Teknologi Bandung
3. Institut Teknologi Bacharuddin Jusuf Habibie
4. Institut Teknologi Kalimantan
5. Institut Teknologi Sepuluh Nopember
6. Institut Teknologi Sumatera
7. Institut Seni Budaya Indonesia Aceh
8. Institut Seni Budaya Indonesia Bandung
9. Institut Seni Budaya Indonesia Tanah Papua
10. Institut Seni Indonesia Denpasar
11. Institut Seni Indonesia Padang Panjang
12. Institut Seni Indonesia Surakarta
13. Institut Seni Indonesia Yogyakarta
14. Universitas Airlangga
15. Universitas Andalas
16. Universitas Bangka Belitung
17. Universitas Bengkulu
18. Universitas Borneo Tarakan
19. Universitas Brawijaya
20. Universitas Cendrawasih
21. Universitas Diponegoro
22. Universitas Gadjah Mada
23. Universitas Haluoleo
24. Universitas Hasanuddin
25. Universitas Indonesia
26. Universitas Jambi
27. Universitas Jember
28. Universitas Jenderal Soedirman
29. Universitas Khairun
30. Universitas Lambung Mangkurat
31. Universitas Lampung
32. Universitas Malikussaleh
33. Universitas Maritim Raja Ali Haji
34. Universitas Mataram
35. Universitas Mulawarman
36. Universitas Musamus Merauke
37. Universitas Negeri Gorontalo
38. Universitas Negeri Jakarta
39. Universitas Negeri Makassar
40. Universitas Negeri Malang
41. Universitas Negeri Manado
42. Universitas Negeri Medan
43. Universitas Negeri Padang
44. Universitas Negeri Semarang
45. Universitas Negeri Surabaya
46. Universitas Negeri Yogyakarta
47. Universitas Nusa Cendana



48. Universitas Padjadjaran
49. Universitas Palangkaraya
50. Universitas Papua
51. Universitas Pattimura
52. Universitas Pendidikan Ganesha
53. Universitas Pendidikan Indonesia
54. Universitas Riau
55. Universitas Sam Ratulangi
56. Universitas Samudra
57. Universitas Sebelas Maret
58. Universitas Sembilan Belas November Kolaka
59. Universitas Siliwangi
60. Universitas Singaperbangsa Karawang
61. Universitas Sriwijaya
62. Universitas Sulawesi Barat
63. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
64. Universitas Sumatera Utara
65. Universitas Syiah Kuala
66. Universitas Tadulako
67. Universitas Tanjungpura
68. Universitas Terbuka
69. Universitas Teuku Umar
70. Universitas Tidar
71. Universitas Timor
72. Universitas Trunojoyo Madura
73. Universitas Udayana
74. Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
75. Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur
76. Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta
77. Universitas Pertahanan Indonesia





**KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

JALAN TAMAN SUROPATI NOMOR 2 JAKARTA 10310
TELEPON (021) 31936207, 3905650; FAKSIMILE (021) 3145374
www.bappenas.go.id

PENGUMUMAN

NOMOR: 001/PANSEL.BPS/02/2024

**TENTANG
SELEKSI TERBUKA JABATAN PIMPINAN TINGGI UTAMA
PADA BADAN PUSAT STATISTIK TAHUN 2024**

Dalam rangka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Utama pada Badan Pusat Statistik, dengan ini kami mengundang Pegawai Negeri Sipil di seluruh wilayah Indonesia yang telah memenuhi syarat untuk mendaftarkan diri mengikuti seleksi terbuka dengan ketentuan sebagai berikut:

I. JABATAN YANG LOWONG

Jabatan Pimpinan Tinggi Utama formasi **Kepala Badan Pusat Statistik**.

II. PERSYARATAN UMUM

1. Berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil;
2. Memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah sarjana atau diploma IV, calon dengan pendidikan pascasarjana memiliki nilai tambah;
3. Memiliki Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi jabatan yang ditetapkan;
4. Memiliki pengalaman Jabatan dalam bidang tugas yang terkait dengan Jabatan yang akan diduduki secara kumulatif paling singkat selama 10 (sepuluh) tahun;
5. Sedang atau pernah menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Madya atau Jabatan Fungsional (JF) jenjang ahli utama paling singkat 2 (dua) tahun;
6. Memiliki rekam jejak jabatan, integritas, dan moralitas yang baik;
7. Usia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun pada Oktober 2024;
8. Sehat jasmani dan rohani;
9. Sekurang-kurangnya memiliki pangkat Pembina Utama Muda (golongan IV/c);
10. Diutamakan telah lulus Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Nasional bagi pejabat yang sedang atau pernah menduduki jabatan struktural, dikecualikan bagi yang pernah/sedang menduduki jabatan fungsional tertentu jenjang ahli utama/setara;
11. Kemampuan berbahasa inggris secara aktif menjadi nilai tambah dalam penilaian;
12. Setiap unsur Penilaian Prestasi Kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir (tahun 2022 dan 2023);

13. Tidak . . .

13. Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang sekurang-kurangnya dalam periode 5 (lima) tahun terakhir atau tingkat berat sekurang-kurangnya dalam periode 10 (sepuluh) tahun terakhir dan bukan hukuman disiplin terkait korupsi dan memperlakukan instansi dan/atau tidak sedang dalam proses penyelesaian pelanggaran disiplin tingkat sedang atau berat sesuai ketentuan perundang-undangan;
14. Tidak memiliki afiliasi dan/atau menjadi anggota partai politik atau tidak pernah menjadi calon anggota legislatif dari partai politik;
15. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara;
16. Telah menyampaikan LHKPN tahun terakhir (tahun 2023);
17. Telah menyampaikan SPT tahun terakhir (tahun 2023);
18. Mendapat persetujuan/rekomendasi dari Pejabat Pembina Kepegawaian;
19. Menyampaikan daftar riwayat hidup yang ditandatangani oleh pelamar dan ditujukan kepada ketua panitia seleksi; dan
20. Bersedia mengikuti keseluruhan proses dan mematuhi tata tertib seleksi.

III. PERSYARATAN KHUSUS

Menyusun *Statement of Purpose* (ringkasan dari apa yang akan dilakukan), yang meliputi misi, wawasan, dan rencana untuk mengembangkan Badan Pusat Statistik (BPS) secara umum, dengan ketentuan penulisan sebagai berikut:

- Ukuran kertas : A4
- Batas margin : atas 4cm; kiri 3cm; kanan 3cm; bawah 3cm
- Huruf : Times New Roman ukuran 12
- Spasi : 1,5
- Jumlah halaman : maksimal 2 halaman

IV. KETENTUAN PENDAFTARAN

1. Pendaftaran dilakukan secara *online* (bukan melalui email) dengan mengisikan biodata yang dibutuhkan melalui web <http://seleksijpt.bps.go.id> mulai tanggal 20 Februari 2024;
2. Melengkapi berkas pendaftaran yang terdiri dari:
 - a. Surat Lamaran Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Utama Kepala Badan Pusat Statistik **bermeterai**, ditujukan kepada panitia seleksi;
 - b. Daftar Riwayat Hidup yang dilengkapi dengan pas foto berwarna ukuran 4x6;
 - c. Surat pernyataan **bermeterai** yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang sekurang-kurangnya dalam periode 5 (lima) tahun terakhir atau tingkat berat sekurang-kurangnya dalam periode 10 (sepuluh) tahun terakhir dan bukan hukuman disiplin terkait korupsi dan memperlakukan instansi; tidak sedang dalam proses penyelesaian pelanggaran disiplin tingkat sedang atau berat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak pernah dipidana dengan pidana penjara;

d. Surat . . .

- d. Surat pernyataan tidak memiliki afiliasi dan/atau menjadi anggota partai politik atau tidak pernah menjadi calon anggota legislatif dari partai politik;
 - e. Pakta integritas **bermeterai**;
 - f. Surat pernyataan persetujuan dari Pejabat Pembina Kepegawaian;
Formulir dokumen butir (b) sampai dengan (f) dapat diunduh di web: <http://seleksijpt.bps.go.id>;
 - g. Surat Keputusan Pengangkatan dalam pangkat terakhir;
 - h. Surat Keputusan Pengangkatan dalam jabatan terakhir;
 - i. Ijazah terakhir;
 - j. Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan bagi yang dipersyaratkan;
 - k. Tanda bukti pelaporan LHKPN tahun terakhir (tahun 2023);
 - l. Tanda bukti penyampaian SPT tahun terakhir (tahun 2023);
 - m. Surat Keterangan sehat jasmani dari dokter Klinik/Puskesmas/Rumah Sakit Pemerintah;
 - n. Penilaian Prestasi Kerja 2 (dua) tahun terakhir (tahun 2022 dan 2023).
3. Berkas administrasi yang terdiri dari *statement of purpose* dan berkas pendaftaran harus diunggah ke web <http://seleksijpt.bps.go.id> paling lambat tanggal 5 Maret 2024 pukul 16.00 WIB.

V. JADWAL KEGIATAN

NO	NAMA KEGIATAN	JADWAL
1	Pendaftaran dan pengiriman berkas lamaran	20 Februari - 5 Maret 2024
2	Pemeriksaan berkas dan seleksi administrasi	6 - 7 Maret 2024
3	Pengumuman Seleksi Administrasi	8 Maret 2024
4	Tes Penulisan Makalah	14 Maret 2024
5	Pengumuman Seleksi Makalah	20 Maret 2024
6	Pemeriksaan kesehatan	25 - 26 Maret 2024
7	Penilaian Kompetensi (<i>Assessment Center</i>)	27 - 28 Maret 2024
8	Penelusuran rekam jejak calon	19 Maret - 15 April 2024
9	Wawancara dengan pansel	17 April 2024
19	Pengumuman tiga terbaik	22 April 2024

Catatan: Jadwal sewaktu-waktu dapat berubah.

VI. KETENTUAN LAIN

1. Berkas administrasi yang akan diproses adalah berkas yang lengkap sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan;
2. Apabila jumlah pelamar yang memenuhi persyaratan belum memenuhi jumlah yang ditetapkan, maka waktu pendaftaran akan diperpanjang;
3. Pelaksanaan . . .

3. Pelaksanaan tahapan seleksi akan dilakukan secara virtual dan/atau secara tatap muka;
4. Panitia Seleksi akan melakukan penilaian Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi jabatan yang ditetapkan;
5. Panitia Seleksi akan melakukan penelusuran rekam jejak calon secara tertutup dan obyektif;
6. Masyarakat yang mengetahui rekam jejak pelamar agar menyampaikan ke Ketua Panitia Seleksi dengan alamat rekamjejakcalonjptbps@bps.go.id dengan memberikan identitas yang dapat dipertanggungjawabkan paling lambat tanggal 15 April 2024;
7. Dalam pelaksanaan seleksi ini **TIDAK DIKENAKAN BIAYA ATAU PUNGUTAN DALAM BENTUK APAPUN**;
8. Biaya transportasi, akomodasi, dan biaya lainnya selama mengikuti seleksi ditanggung oleh masing-masing peserta;
9. Apabila di kemudian hari diketahui pelamar memberikan data/keterangan tidak benar maka Panitia Seleksi berhak membatalkan hasil seleksi;
10. Keputusan Panitia Seleksi bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat;
11. Setiap perkembangan informasi seleksi disampaikan melalui situs web: <http://seleksijpt.bps.go.id>;
12. Akibat kelalaian tidak mengikuti perkembangan informasi menjadi tanggung jawab pelamar; dan
13. Informasi tentang proses pendaftaran secara online dapat menghubungi nomor telepon (0856-9192-2692 dan 0812-1042-004) atau email ke panseljpt@bps.go.id.

Jakarta, 20 Februari 2024
Ketua Panitia Seleksi
Calon Kepala Badan Pusat Statistik,



Ditandatangani secara elektronik oleh:

SEKRETARIS KEMENTERIAN PPN/SEKRETARIS UTAMA BAPPENAS

Teni Widuriyanti

